

**ANALISIS STAKEHOLDER  
UNTUK PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN  
Studi di Desa Pakah Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi  
RPH Pakah BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi**

Arief Khristanto<sup>1)</sup>  
Wahyu Tri Widayanti S.Hut, M.P.<sup>2)</sup>

**Intisari**

Diterapkannya desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam melalui otonomi daerah serta penerapan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Jawa, menjadikan Perhutani tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang dapat melakukan pengelolaan hutan di Jawa. Dengan kata lain, terjadi pengelolaan sumberdaya hutan *multistakeholder* di Jawa, termasuk Pakah. Dari itu perlu dilakukan suatu analisis *stakeholder* guna memahami keadaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa sajakah *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan hutan di Pakah beserta segala permasalahannya, berikut karakteristik, kekuatan dan potensinya. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai sistem pengelolaan hutan yang terbentuk akibat interaksi para *stakeholder* serta visi bersama dari para *stakeholder* untuk merumuskan *collective action* dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Metode dasar dalam penelitian ini adalah metode eksploratoris, deskriptif, eksplanatif. Secara global, langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis *stakeholder* yang dikembangkan oleh International Institute of Environmental Development (IIED)

Dari penelitian diketahui ada 6 *stakeholder* yang terlibat langsung dalam pengelolaan hutan beserta permasalahannya di Pakah, yaitu; Perhutani KPH Ngawi, Pemerintah Kabupaten Ngawi, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sido Makmur, Bintara, Pemerintah Desa Pakah, dan Badan Pertimbangan Pengelolaan *Wanareksa* (BP2W). Seluruh *stakeholder* memiliki kekuatan, pengaruh dan potensi berbeda yang memberikan pengaruh dalam sistem pengelolaan Hutan di Ngawi yang diterapkan di Pakah. Interaksi dari seluruh *stakeholder* diatas membentuk dua sistem kebijakan bernama PHBM yang berasal dari Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Walaupun seluruh *stakeholder* telah berusaha melakukan penerapan sistem PHBM tersebut bersama-sama, namun pada hakekatnya belum terbentuk suatu visi bersama dari seluruh *stakeholder* mengenai bentuk PHBM yang akan dijalankan bersama dalam sebuah *collective action* dari seluruh *stakeholder*.

Kata Kunci : *Stakeholder*, Pengelolaan Hutan, Analisis *Stakeholder*

<sup>1)</sup> Mahasiswa Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta

<sup>2)</sup> Dosen Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta